

**Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari**  
*(Stakeholder Analysis in the Sustainable Management of Private Forest)*

**Ismawati D. Kartika<sup>1,5\*</sup>, Pandu Y.P. Putra<sup>1,5</sup>, Ghilman M. Aqil<sup>4,5</sup>, Dian R. Putri<sup>1,5</sup>, Hadiyan P. Kusumanegara<sup>1,5</sup>, Pramaayu B. Linardi<sup>1</sup>, Zildjan Nasrullah<sup>1,5</sup>, Ismaya S.J. Winara<sup>1,5</sup>, Njimou P.M. Sri<sup>1,5</sup>, Farhan Prasetyo<sup>1,5</sup>, Mohammad R. Akbar<sup>1,5</sup>, ABD. R. A. Pase<sup>1,5</sup>, Annisa R. Aprianti<sup>2,5</sup>, Nur A. Palewoi<sup>3,5</sup>, Muhammad R. Ridwan<sup>4,5</sup>, dan/and Nasya S.A.N. Uhusna<sup>4,5</sup>**

<sup>1</sup>Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Jawa Barat, Indonesia, 16680, Telp. 0251-8621244

<sup>2</sup>Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Jawa Barat, Indonesia, 16680, Telp. 0251-8621285

<sup>3</sup>Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Jawa Barat, Indonesia, 16680, Telp. 0251-8626806

<sup>4</sup>Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Jawa Barat, Indonesia, 16680, Telp. 0251-8624120

<sup>5</sup>Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa Tahun 2024, Forest Management Students' Club, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Jawa Barat, Indonesia, 16680, Telp. 0251-8621244

\*E-mail : ismawatidwi288@gmail.com

Tanggal diterima: 31 Agustus 2025; Tanggal disetujui: 23 Juli 2025; Tanggal direvisi: 6 Agustus 2025

**Abstract**

*Private forests in Karacak Village play a vital role in supporting community welfare through economic, social, and ecological benefits. However, their management faces challenges like suboptimal stakeholders coordination and limited resources. This study aims to map the roles and interests of various stakeholders in sustainable private forest management using stakeholder analysis based on power and interest levels. The research methods include field observation, in-depth interviews with 10 key informants, and data analysis using an interest matrix and actor mapping. The results identify four stakeholder groups: key players (Agriculture Office, Forest Farmers Group leader, local farmers), subjects (academics, the head of forest farmers group, women's group in the village, local farmers, and Forestry Agency of West Java Province), context setters (non-local middlemen, exporters), and crowd (village officials). Findings indicate that the production subsystem is the primary focus for all actors, while marketing and institutional subsystems have conflict potential due to unequal access and benefits. Strategic recommendations include enhancing multi-stakeholder collaboration, strengthening local institutions, and adopting participatory approaches to achieve sustainable forest management.*

**Keywords:** Private forest, sustainable management, stakeholders

**Abstrak**

Hutan rakyat di Desa Karacak memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi. Namun, pengelolaannya menghadapi tantangan, seperti koordinasi antaraktor yang belum optimal dan keterbatasan sumber daya. Penelitian bertujuan untuk memetakan peran dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan rakyat lestari menggunakan analisis *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*). Metode penelitian menggunakan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan 10 informan kunci, dan analisis data menggunakan pendekatan matriks kepentingan serta pemetaan aktor. Hasil penelitian mengidentifikasi empat kelompok pemangku kepentingan, yaitu *key players* (Dinas Pertanian, Ketua Kelompok Tani Hutan, petani), *subjects* (akademisi, Dinas Kehutanan Provinsi), *context setters* (tengkulak non-lokal, eksportir), dan *crowd* (aparatur desa). Penelitian menunjukkan bahwa subsistem produksi menjadi prioritas utama semua aktor, sedangkan subsistem pemasaran dan kelembagaan berpotensi menimbulkan konflik akibat ketimpangan akses dan manfaat. Rekomendasi strategi meliputi peningkatan kolaborasi antaraktor, penguatan kelembagaan lokal, dan pendekatan partisipatif untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Hutan rakyat, pengelolaan lestari, pemangku kepentingan

## 1. Pendahuluan

Hutan rakyat didefinisikan sebagai hutan hak yang terletak pada tanah yang dibebani hak milik (Permen LHK, 2021). Menurut Darusman & Hardjanto (2006), pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bogor memiliki potensi yang besar dalam pembangunan kehutanan. Hutan rakyat di Kabupaten Bogor memiliki luas 33.084,91 hektar pada tahun 2020 (Dishut, 2020). Hutan rakyat merupakan salah satu sumberdaya yang membantu kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Manfaat secara langsung yang dapat dirasakan dari pengelolaan hutan rakyat, meliputi manfaat ekonomi dan sosial (Hardjanto, 2017). Selain itu, manfaat tidak langsung yang dapat diperoleh dari pengelolaan hutan rakyat, antara lain berupa perlindungan dan pengaturan tata air, sarana penanggulangan lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, dan pencegahan erosi (Sukwika, 2018). Manfaat tersebut akan optimal saat aktor yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan rakyat sesuai dengan prinsip kelestarian.

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengelolaan hutan rakyat yang lestari (Fauzan et al., 2019). Hardjanto (2003) menegaskan bahwa terdapat empat subsistem dalam pengelolaan hutan rakyat, yaitu produksi, pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan. Hutan rakyat Desa Karacak memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Namun, pengelolaan hutan rakyat yang efektif tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Proses ini melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah desa, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini selaras dengan pernyataan Darusman et al. (2013) yang menyatakan bahwa membangun pendekatan baru untuk pengelolaan hutan lestari yang melibatkan

partisipasi parapihak merupakan kebutuhan mendesak.

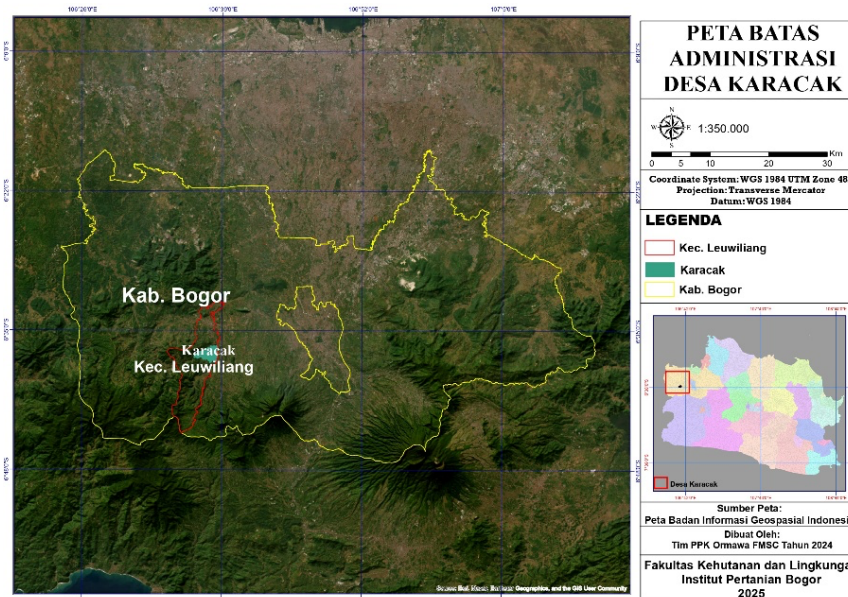
Keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan bergantung pada peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan atau pemanfaatan lahan. Namun masih terdapat tantangan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan terutama terkait dengan bagaimana menemukan dan mengenali peran serta kepentingan masing-masing aktor/para pihak dalam pengelolaan hutan. Pemetaan aktor dalam pengelolaan hutan rakyat lestari menjadi krusial untuk memahami dinamika dan interaksi antara para pemangku kepentingan ini.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengelola hutan rakyat adalah koordinasi antar aktor yang belum optimal, sehingga menyebabkan program yang dirancang menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumberdaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola hutan juga memicu ketidakberhasilan program, baik dalam hal pengetahuan teknis, finansial, maupun akses pasar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah pemetaan aktor serta analisis peran dan interaksi antar aktor/parapihak yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam pengelolaan hutan rakyat, serta mencari solusi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang ada. Studi ini dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan hutan rakyat yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan hutan rakyat.

## 2. Metodologi

### 2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Juli 2024 di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi penelitian berada pada koordinat 6°37'02" LS dan 106°37'43" BT dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut.



Gambar (Fig.) 1. Peta administrasi Desa Karacak (*Administration map of Karacak Village*)

## 2.2. Metode

### 2.2.1. Tahapan Pelaksanaan

Observasi lapang dilakukan pada area riset sekaligus juga melakukan identifikasi aktor/para pihak sebagai informan kunci yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat. Penetapan informan kunci dilakukan melalui *purposive sampling* (dengan sengaja) digunakan untuk memilih aktor-aktor yang diasumsikan memiliki kepentingan signifikan, termasuk aparat desa, penyuluh pertanian dan kehutanan, ketua kelompok tani, masyarakat pengguna (ibu PKK, petani, dan tengkulak), serta dinas terkait. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan terpilih secara langsung menggunakan *instrument* kuesioner untuk mendapatkan matrik kepentingan dan pemetaan aktor dalam pengelolaan hutan.

Jumlah informan adalah 10 orang yang merupakan tokoh desa sekaligus pemilik hutan rakyat. Selanjutnya, *purposive sampling* digunakan untuk menambah responden hingga data yang diperoleh menunjukkan homogenitas. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitiannya (Dana, 2017).

### 2.2.2. Analisis Data

Skala *likert* 1-5 digunakan untuk

menilai tingkat kesesuaian responden terhadap pernyataan yang menggambarkan peran aktor dalam pengelolaan hutan rakyat, baik dari segi kepentingan (*interest*) maupun pengaruh (*power*). Setiap angka pada skala *likert* memiliki makna tersendiri, yaitu skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju, yang berarti aktor sama sekali tidak relevan atau tidak memiliki keterlibatan dalam aspek yang dinilai; skor 2 menunjukkan tidak setuju, yang menggambarkan bahwa aktor memiliki keterlibatan atau pengaruh yang sangat minim; skor 3 menunjukkan netral, yang berarti peran aktor dianggap sedang atau tidak menonjol dalam pengelolaan; skor 4 menunjukkan setuju, dimana aktor dinilai cukup terlibat dan memiliki pengaruh atau kepentingan yang nyata; sedangkan skor 5 menunjukkan sangat setuju, yang berarti aktor memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat. Penilaian ini dilakukan untuk memudahkan pemetaan aktor dalam matriks *power-interest* berdasarkan teori *Krott*, sehingga dapat diketahui siapa saja aktor kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan hutan rakyat. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk mengidentifikasi peran setiap aktor sebagai *subject*, *keyplayers*, *crowd*, dan *context setter*, serta untuk memetakan keterkaitan antara mereka. Hasil

penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi potensi konflik dan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengelolaan hutan rakyat yang efektif dan partisipatif di Desa Karacak.

### 3. Hasil dan Pembahasan

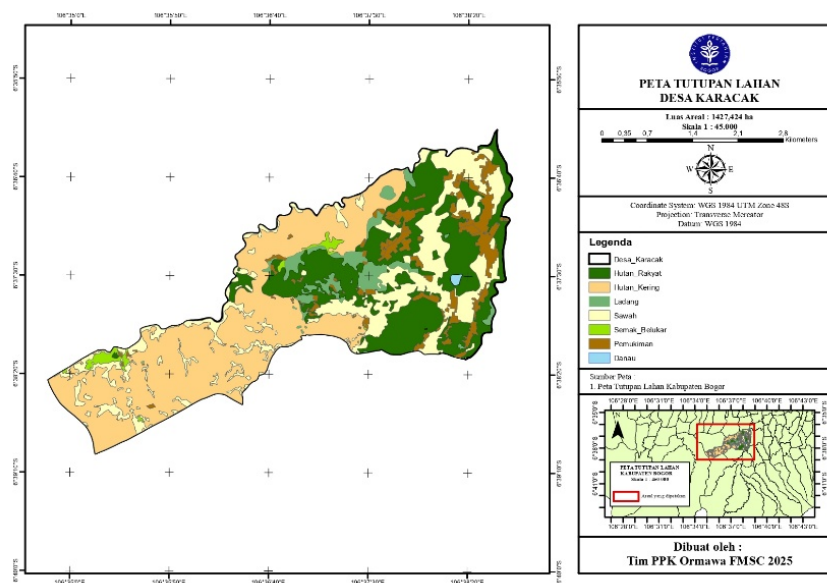
#### 3.1. Hasil

##### 3.1.1. Keadaan umum Hutan Rakyat di Desa Karacak

Hutan rakyat di Desa Karacak ditanam di lahan datar dan berlereng yang telah dilakukan perlakuan konservasi tanah dan air secara mekanis dalam bentuk teras bangku (*bench terrace*). Lokasi hutan rakyat di Desa Karacak tersebar meluas meliputi keseluruhan wilayah administrasi desa berbatasan dengan areal pemukiman, sungai, sawah, dan jalan. Luasan hutan rakyat bervariasi mulai dari 0,04 - 0,25 ha yang dikelola secara turun-temurun oleh keluarga petani hutan rakyat di Desa Karacak. Komoditas utama yang ditanam di hutan rakyat Desa Karacak berupa manggis (*Garcinia mangostana* L.), durian (*Durio zibethinus* L.), dukuh (*Lansium domesticum* Corrêa), nangka (*Artocarpus heterophyllus* Lamk.), cempedak (*Artocarpus integer* Merr.),

alpukat (*Persea americana* Mill.) dan melinjo (*Gnetum gnemon* Linnaeus.). Tanaman manggis dan durian menjadi komoditas utama yang ditanam di hutan rakyat wilayah atas Desa Karacak, selain tanaman buah terdapat juga jenis tanaman penghasil kayu rakyat yaitu sengon (*Paraserianthes falcataria* (L.) I.C. Nielsen), mindi (*Melia azedarach* L.), jati (*Tectona grandis* L.f.), dan kayu afrika (*Maesopsis eminii* Engl.).

Pola tanam hutan rakyat di Desa Karacak berkarakteristik wanatani (*agroforestry*), sehingga terdapat tanam sela yang ditanam menyesuaikan dengan tingkat tutupan tajuk yang rapat diantaranya, cengkeh, kemiri, dan kapulaga. Sementara itu di lokasi hutan rakyat dengan kerapatan tajuk lebih terbuka ditanam beberapa jenis tanaman semusim antara lain cabai rawit, kacang panjang, talas, singkong, pisang, dan kopi arabika. Jarak tanam 1 m × 1 m sudah diterapkan di beberapa lahan hutan rakyat dengan sistem berurutan (*sequential*) antara komoditas manggis dan durian, karena beberapa lahan hutan rakyat tersebut dibangun atas bantuan teknis program rehabilitasi dan reboisasi di masa orde baru.



Gambar (Fig.) 2. Peta tutupan lahan Desa Karacak (*Land cover map of Karacak Village*)



*Gambar (Fig.) 3. Kondisi pola tanam hutan rakyat Desa Karacak (Planting pattern conditions of private forest in Karacak Village)*

**3.1.2. Matrik kepentingan hutan rakyat di Desa Karacak**

Penelitian ini mengeksplorasi kepentingan berbagai aktor dalam pengelolaan hutan rakyat, yang terdiri dari empat subsistem utama produksi, pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan. Keempat subsistem ini saling berkorelasi dan memiliki peran penting dalam mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden memberikan skor berdasarkan tingkat kepentingan, mulai dari sangat penting hingga rendah, yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Temuan menunjukkan bahwa setiap aktor, seperti aparat desa, dinas pertanian, dinas kehutanan, kelompok tani, petani, dan eksportir, memiliki tingkat

kepentingan yang bervariasi terhadap masing-masing subsistem. Gambar 3 dalam penelitian menggambarkan distribusi kepentingan ini, yang mencerminkan bagaimana setiap aktor berkontribusi atau terpengaruh oleh pengelolaan hutan rakyat. Ini membantu dalam memahami hubungan antara aktor dan subsistem yang ada.

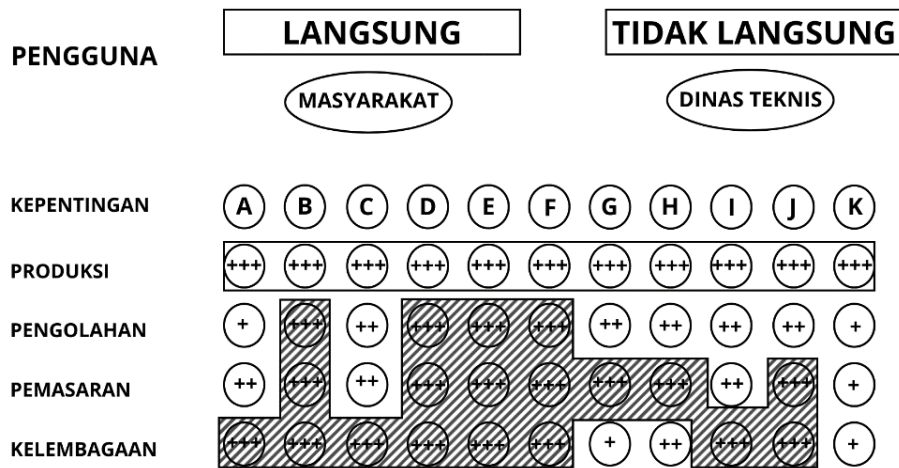
Penelitian ini juga mengidentifikasi area utama kepentingan serta potensi konflik diantara aktor-aktor tersebut. Berdasarkan kepentingan yang sangat kuat, kuat, sedang, dan rendah, peneliti dapat menyoroti dinamika yang mungkin timbul dalam pengelolaan hutan. Hal ini penting untuk merumuskan strategi yang dapat meredakan konflik dan memperkuat kerjasama antara semua pihak yang terlibat.

*Tabel (Table) 1. Ringkasan kepentingan hutan rakyat, aktor, dan potensial konflik dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak (Summary of private forest interests, actors, and potential conflicts in private forest management at Karacak Village)*

Subsistem (Subsystem)	Aktor dengan kepentingan tinggi (Actors with high interests) +++	Potensial konflik (Potential conflict)
Produksi	Aparatur desa, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, ketua KTH, ibu PKK, petani, tengkulak (warga lokal), tengkulak (non lokal), akademisi, eksportir, buruh tani	Tidak ada konflik (kepentingan seragam), karena produksi menjadi area utama kepentingan bagi semua aktor. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hutan rakyat yang berkelanjutan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebutuhan dinas teknis.

Tabel (Table) 1. Lanjutan (Continued)

Subsistem (Subsystem)	Aktor dengan kepentingan tinggi (Actors with high interests) +++	Potensial konflik (Potential conflict)
Pengolahan	Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, ketua KTH, ibu PKK, petani	Ketidakseimbangan dalam subsistem pengolahan dapat menyebabkan ketidakpuasan diantara para aktor yang berkepentingan rendah karena mereka merasa kurang terlibat atau tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari proses pengolahan.
Pemasaran	Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, ketua KTH, ibu PKK, petani, tengkulak (warga lokal), tengkulak (non lokal), eksportir (pengusaha)	Kesenjangan dalam pemasaran dapat menimbulkan konflik antara aktor yang memiliki kepentingan tinggi dan rendah karena perbedaan dalam akses pasar dan keuntungan. Aktor dengan kepentingan rendah merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dalam hasil pemasaran.
Kelembagaan	Aparatur desa, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, ketua KTH, ibu PKK, akademisi, eksportir (pengusaha)	Perbedaan pandangan dalam kelembagaan dapat menyebabkan konflik antara aktor yang terlibat secara intensif dalam subsistem kelembagaan dan aktor yang memiliki kepentingan rendah. Aktor dengan kepentingan rendah merasa bahwa struktur kelembagaan yang ada tidak mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan mereka secara memadai.



Keterangan (Remarks): 1.  = Area utama kepentingan (Main areas of interest); 2.  = Area konflik (Conflict area); 3. (+++) = Kepentingan yang sangat kuat (Very strong interest); 4. (++) = Kepentingan yang kuat (Strong interests); 5. (+) = Kepentingan sedang (Medium interest); 6. A = Aparatur desa (Village apparatus); 7. B = Dinas Pertanian Kabupaten Bogor (Bogor Regency Agriculture Service); 8. C = Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (West Java Provincial Forestry Service); 9. D = Ketua kelompok tani hutan (Head of forest farmers group); 10. E = Ibu PKK (Women's group at the village); 11. F = Petani (Farmer); 12. G = Tengkulak warga lokal (local middlemen); 13. H = Tengkulak non lokal (non local middlemen); 14. I = Akademisi (Academics); 15. J = Eksportir (Exporter); 16. K = Buruh tani (Farm workers)

Gambar (Fig.) 4. Matrik kepentingan aktor pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak (Matrix of interests of actors in private forest management at Karacak Village)

Pohon sasaran dipilih berdasarkan Penelitian ini menyajikan matrik kepentingan yang dirangkum dalam Tabel 1, yang memberikan gambaran jelas tentang area utama kepentingan dan potensi konflik dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak. Tabel 1 menyusun informasi tentang aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana kepentingan mereka berinteraksi dalam konteks subsistem yang berbeda. Ini menjadi alat penting untuk memahami dinamika hubungan antar aktor dalam pengelolaan hutan.

Dalam subsistem produksi, hampir semua aktor, termasuk aparat desa, dinas pertanian, dinas kehutanan, ketua kelompok tani, petani, dan tengkulak, menunjukkan kepentingan yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi hutan rakyat merupakan area yang disepakati sebagai prioritas oleh semua pihak. Tidak adanya konflik dalam subsistem ini mencerminkan kesepakatan umum tentang pentingnya hasil hutan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan produksi, subsistem pengolahan menunjukkan potensi konflik yang lebih besar. Di sini, dinas pertanian, ketua kelompok tani, ibu PKK, dan petani memiliki kepentingan tinggi, tetapi terdapat ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan diantara aktor yang berkepentingan rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keterlibatan atau manfaat yang dirasakan oleh aktor-aktor tertentu dalam proses pengolahan, yang dapat mengganggu kerjasama diantara mereka.

Subsistem pemasaran juga menunjukkan adanya kesenjangan yang dapat memicu konflik. Aktor dengan kepentingan tinggi, seperti dinas pertanian, ketua kelompok tani, dan eksportir, diduga memiliki akses yang lebih baik ke pasar dibandingkan aktor dengan kepentingan rendah. Kesenjangan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan aktor yang merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil pemasaran, menciptakan potensi konflik

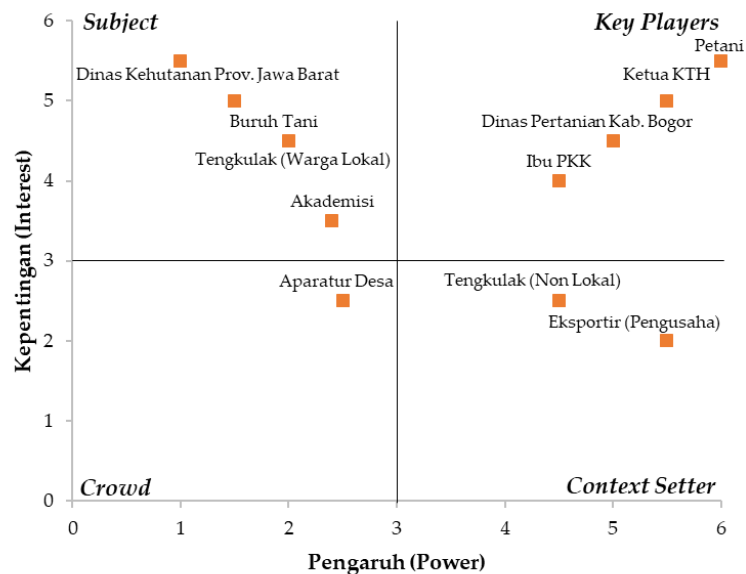
yang perlu dikelola dengan baik.

Dalam subsistem kelembagaan, terdapat perbedaan pandangan yang dapat memicu konflik antara aktor yang terlibat secara intensif dan mereka yang memiliki kepentingan rendah. Aktor seperti aparat desa dan dinas kehutanan memiliki kepentingan tinggi, sedangkan aktor dengan kepentingan rendah merasa kurang terwakili dalam struktur kelembagaan yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam keterlibatan dan representasi semua aktor dalam proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan semua aktor dalam pengelolaan hutan rakyat sangat penting untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Ketidakpuasan yang dirasakan oleh aktor dengan kepentingan rendah dapat mengganggu kerja sama dan mengurangi efektivitas pengelolaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diakomodasi. Strategi yang dapat dilakukan adalah pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak mengadopsi pendekatan yang lebih transparan dan partisipatif. Ini dapat meliputi pembentukan forum diskusi yang melibatkan semua aktor untuk membahas kepentingan dan potensi konflik secara terbuka. Diharapkan melalui forum diskusi dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan dan mengurangi ketegangan diantara aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan rakyat.

### **3.1.3. Pemetaan aktor dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak**

Pemetaan para aktor menjelaskan tentang peran (pengaruh dan kepentingan) masing-masing aktor terhadap kelestarian hutan rakyat di Desa Karacak. Hasil pemetaan aktor diperoleh dari hasil skoring setiap aktor untuk mengetahui tingkat kepentingan serta pengaruhnya terhadap keberadaan hutan rakyat. Pemetaan pada Gambar 4 menjelaskan bagaimana posisi aktor atas perannya terhadap hutan rakyat.



Gambar (Fig.) 5. Pemetaan aktor dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak (*Actor mapping in private forest management at Karacak Village*)

Implementasi hasil pemetaan aktor dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, membentuk forum atau kelompok kerja yang melibatkan semua aktor teridentifikasi untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan bersama terkait pengelolaan hutan rakyat. Selanjutnya, diperlukan penyediaan pelatihan bagi aktor kunci, seperti petani dan aparat desa, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta keterampilan negosiasi dan kolaborasi. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan semua aktor dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara dari setiap pihak, terutama yang memiliki kepentingan rendah, didengar dan dipertimbangkan.

Rencana aksi yang jelas harus disusun berdasarkan hasil pemetaan, dengan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi, serta menetapkan tanggung jawab masing-masing aktor dan waktu pelaksanaan. Sistem monitoring juga harus diimplementasikan untuk menilai efektivitas pengelolaan hutan dan kolaborasi antar aktor, dengan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil dan umpan balik. Membangun jaringan kerjasama antara aktor lokal dan lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah juga sangat penting untuk mobilisasi sumber daya dan

dukungan teknis. Selain itu, menciptakan akses pasar yang lebih baik bagi aktor dengan kepentingan rendah, seperti petani, akan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang adil dari hasil hutan. Terakhir, kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan hutan rakyat dan kolaborasi antar aktor dapat membantu membangun dukungan publik dan keterlibatan komunitas dalam pengelolaan hutan rakyat. Berdasarkan langkah-langkah ini, pemetaan aktor dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.

### 3.2. Pembahasan

#### 3.2.1. Kepentingan hutan rakyat di Desa Karacak

Hasil yang digunakan dalam matrik kepentingan ini diambil dari pendekatan teori Krott (2005) dan disesuaikan dengan kondisi di lokasi penelitian. Matriks ini menggambarkan kepentingan masing-masing aktor terhadap keberadaan hutan rakyat, area utama kepentingan, serta potensi konflik yang mungkin timbul diantara aktor-aktor tersebut. Matriks ini berfungsi untuk mempermudah pemahaman tentang hasil yang diperoleh. Berdasarkan pemahaman area kepentingan utama dan potensi konflik yang ada, strategi pengelolaan hutan rakyat dapat disusun dengan lebih efektif

dan inklusif untuk memastikan keberlanjutan serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Ada empat kepentingan hutan rakyat dan potensial konflik dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak, yaitu:

- a. Kepentingan terhadap subsistem produksi. Pengelolaan hutan rakyat sangat penting untuk subsistem produksi, yang mencakup keseimbangan jumlah, jenis, dan kualitas hasil, serta jaminan kelestarian usaha pemilik lahan hutan rakyat (Djamal et al., 2018). Produksi yang optimal tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, sementara keberlanjutan usaha menjamin kelangsungan hidup mereka di masa depan. Penduduk Desa Karacak memiliki peran penting dalam kegiatan produksi hutan rakyat yang lestari, bertanggung jawab untuk menanam dan memelihara pohon serta memastikan ketersediaan sumber daya hutan secara berkelanjutan (Kimaro, 2023). Tingginya komitmen masyarakat untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil hutan terlihat dari tanda “+++” dalam matriks (Sylviani et al., 2020). Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan produksi adalah faktor kunci keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, dinas teknis (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten Bogor) memberikan dukungan terhadap kegiatan produksi melalui bimbingan teknis, bantuan teknologi, dan peraturan yang mendukung (Tabot et al., 2020). Tanda “+++” yang diberikan kepada seluruh dinas teknis menunjukkan peran penting mereka dalam membantu masyarakat mencapai hasil produksi yang optimal, sekaligus memastikan bahwa metode produksi memenuhi standar lingkungan dan keberlanjutan.
- b. Kepentingan terhadap subsistem pengolahan. Subsistem pengolahan juga melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Proses ini mencakup pengolahan hasil hutan rakyat menjadi produk akhir yang siap dijual atau digunakan (Djamal et al., 2018).

Contoh pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk buah manggis yang diolah menjadi sirup atau teh dari kulitnya. Pengolahan yang efektif dapat meningkatkan nilai tambah produk hutan rakyat, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan petani. Tanda “++” dan “+++” dalam matriks mencerminkan pentingnya pengolahan hasil hutan sebagai bagian dari kegiatan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Dalam subsistem ini, aktor dengan kepentingan tinggi, meliputi Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Ketua KTH, ibu PKK, dan petani, yang ditunjukkan dengan tanda “+++”. Pengolahan hasil hutan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai ekonomi produk hutan, yang menjadikan keempat aktor tersebut sangat berkepentingan. Namun, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan diantara aktor lain dengan kepentingan rendah, yang mungkin merasa kurang terlibat atau tidak mendapatkan manfaat dari proses pengolahan, sehingga berpotensi memicu konflik terkait distribusi keuntungan dan peran dalam pengolahan.

- c. Kepentingan terhadap subsistem pemasaran. Pengelolaan hutan rakyat juga melibatkan subsistem pemasaran untuk mencapai tingkat penjualan yang optimal. Subsistem ini mencakup berbagai aktivitas, seperti penjualan hasil hutan melalui tengkulak atau langsung ke industri, serta pengembangan model pemasaran yang efisien. Umumnya, penjualan dilakukan melalui tengkulak yang berperan sebagai penentu harga. Pengelolaan yang efektif dalam pemasaran dapat meningkatkan pendapatan petani hutan rakyat, memperluas pasar, dan mengurangi biaya pemanenan dan pengangkutan, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah (Kurniawan et al., 2020). Subsistem pemasaran mencakup distribusi dan penjualan hasil hutan ke pasar yang lebih luas, dengan aktor seperti Dinas Pertanian Kabupaten

Bogor, ketua KTH, petani, tengkulak lokal dan non-lokal, serta eksportir memiliki kepentingan tinggi. Mereka terlibat langsung dalam memastikan produk mencapai pasar dan mendapatkan harga yang layak. Sebaliknya, aktor seperti aparat desa dan dinas kehutanan serta akademisi memiliki kepentingan yang lebih rendah dalam pemasaran. Kesenjangan ini dapat menyebabkan konflik akibat perbedaan akses pasar dan keuntungan, dimana aktor dengan kepentingan rendah merasa tidak mendapatkan bagian yang adil, sementara aktor berkepentingan tinggi merasa terbebani dengan tanggung jawab pemasaran.

- d. Kepentingan terhadap subsistem kelembagaan. Subsistem kelembagaan mencakup peran lembaga sosial, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya yang saling terkait dalam pengelolaan hutan rakyat. Keberhasilan pengelolaan sangat tergantung pada kinerja lembaga-lembaga ini, yang mendukung perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, serta monitoring dan evaluasi (Kurniawan et al., 2020). Contohnya, pembentukan kelembagaan KTH baru serta penyerahan personil, prasarana, pendanaan, dan dokumen oleh pemerintah provinsi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan. Kelembagaan, meliputi struktur dan sistem yang mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Aktor dengan kepentingan tinggi di subsistem ini, meliputi aparat desa, dinas pertanian dan kehutanan, ketua KTH, PKK, eksportir, dan akademisi. Mereka berperan dalam membentuk kebijakan, memberikan dukungan teknis, dan memastikan koordinasi diantara berbagai pihak. Sebaliknya, petani dan tengkulak memiliki kepentingan yang lebih rendah dalam kelembagaan. Perbedaan pandangan ini dapat menyebabkan konflik antara aktor yang terlibat intensif dalam kelembagaan dan aktor yang memiliki kepentingan rendah, yang merasa bahwa struktur kelembagaan tidak mengakomodasi kebutuhan dan

kepentingan mereka secara memadai, sehingga merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Matriks kepentingan ini menunjukkan bahwa semua aktor, baik masyarakat maupun dinas terkait, menganggap keberadaan dan kepentingan hutan rakyat sangat tinggi. Semua pihak sepakat bahwa hutan rakyat penting dan mendukung kelestariannya, meskipun ada yang mengelola secara langsung dan melalui program-program yang telah ditetapkan. Dari matriks ini, terlihat bahwa koordinasi antar aktor sangat penting untuk mencegah konflik yang lebih luas dan menghindari dominasi kepentingan pribadi. Hingga saat ini, pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak masih terjaga dengan baik antara badan pengelola masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, matriks kepentingan yang disajikan dalam Tabel 1 memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kepentingan berbagai aktor saling terhubung dalam pengelolaan hutan rakyat. Memahami dinamika ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan kepentingan dan potensi konflik secara proaktif, pengelolaan hutan di Desa Karacak dapat dilakukan dengan lebih baik, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

### 3.2.2. Pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak

Pada Gambar 4 di atas diperoleh hasil pemetaan peran para aktor dan dapat dilihat bahwa setiap aktor berada di kuadrannya masing-masing, yaitu *subject*, *context setter*, *keyplayers*, dan *crowd*.

#### a. Kuadran *keyplayers*

Analisis tersebut mengidentifikasi “pemain kunci” dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak. Mereka adalah para pemangku kepentingan yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap keberlanjutan sumber daya hutan (Sylviani et al., 2020). Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, ketua KTH, ibu PKK, dan para petani setempat muncul sebagai pemain

kunci, yang mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai kepentingan kuat dalam kelestarian hutan rakyat. Para pemangku kepentingan ini adalah pihak yang paling terlibat dan proaktif dalam mendorong upaya konservasi dan pengelolaan. Partisipasi dan dukungan mereka sangat penting bagi keberhasilan inisiatif ini.

Dinas Pertanian Kabupaten Bogor sebagai instansi pemerintah yang berwenang, memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kebijakan, program, dan alokasi dana terkait pengelolaan hutan. KTH merupakan organisasi yang beranggotakan para petani hutan, sehingga Ketua KTH berperan penting dalam mengkoordinasikan kegiatan, mewakili aspirasi anggota, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Ibu PKK memiliki pengaruh dalam memobilisasi ibu-ibu untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Para petani sebagai pemilik lahan tentunya memiliki kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan hutan rakyat, dan juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan bagaimana hutan tersebut dikelola. Keterlibatan aktif petani sangat penting dalam penerapan praktik pengelolaan hutan lestari.

b. Kuadran *subject*

Kelompok *subject* terdiri dari pemangku kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, namun pengaruhnya relatif rendah. Dalam konteks Desa Karacak, aktor yang terlibat pada kategori ini adalah akademisi, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, buruh tani dan tengkulak (warga lokal). Meskipun para aktor ini mempunyai kepentingan terhadap hutan rakyat, kemampuan mereka untuk memberikan dampak langsung terhadap proses pengelolaan dan pengambilan keputusan bersifat terbatas. Namun, peran mereka sebagai ahli dan penasihat sangat dibutuhkan dalam menentukan arah inisiatif.

Akademisi memiliki kepentingan dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait hutan rakyat. Namun, akademisi mungkin tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat memiliki kepentingan dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan di tingkat provinsi. Namun, kewenangan mereka tidak sekuat Dinas Pertanian Kabupaten Bogor di tingkat lokal, sehingga masyarakat Desa Karacak belum merasakan perannya. Buruh tani memiliki kepentingan dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan dan upah yang layak dari sektor kehutanan. Namun, buruh tani tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan tengkulak (warga lokal) memiliki kepentingan dalam akses terhadap hasil hutan untuk diperdagangkan. Namun, pengaruh mereka dalam pengelolaan hutan rakyat terbatas. Meskipun kelompok *subject* ini tidak memiliki pengaruh sebesar *keyplayers*, masukan dan partisipasi mereka tetap penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

c. Kuadran *crowd*

Kuadran *crowd* mencakup pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Aparatur desa diidentifikasi sebagai bagian dari *crowd* dalam studi kasus ini. Meskipun para aktor ini tidak terlibat langsung dalam pengelolaan hutan rakyat sehari-hari, peran tidak langsung dan potensi dampak mereka tidak boleh diabaikan. Meskipun aparatur desa memiliki peran dalam pemerintahan desa secara umum, tetapi keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan rakyat tidak sebesar dinas pertanian, ketua KTH, atau petani. Keterlibatan aparatur desa dalam program edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan hutan lestari penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian aktor

lainnya terhadap kelestarian hutan.

d. Kuadran *context setter*

*Context setter* adalah pemangku kepentingan yang memiliki tingkat pengaruh tinggi, namun tingkat kepentingannya relatif rendah terhadap hutan rakyat. tengkulak (non lokal) dan eksportir (pengusaha) termasuk dalam kategori ini. Meskipun pengaruh mereka cukup besar, keterlibatan dan komitmen mereka terhadap inisiatif kehutanan masyarakat terbatas. Namun, upaya untuk melibatkan dan memengaruhi para *context setter* ini tetap penting agar mereka tidak menghambat inisiatif pengelolaan hutan lestari (Asyani & Dewi, 2018).

Tengkulak (non lokal) memiliki pengaruh karena menjadi perantara dalam pemasaran hasil hutan rakyat. Keputusan mereka untuk membeli atau tidak membeli hasil hutan dari Desa Karacak dapat memengaruhi pendapatan petani. Namun, mereka tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kelestarian hutan. Sementara eksportir (pengusaha) memiliki pengaruh karena menghubungkan hasil hutan ke pasar internasional. Permintaan ekspor dapat mendorong peningkatan produksi hasil hutan rakyat. Kepentingan kedua aktor ini hanya fokus pada ketersediaan dan kontinuitas pasokan, bukan pada kelestarian hutan rakyat itu sendiri.

Pemetaan para aktor beserta peran dan pengaruhnya memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika kekuasaan serta potensi tantangan dan peluang dalam pengelolaan hutan rakyat. Mengenali beragam kepentingan dan tingkat pengaruh diantara berbagai aktor, pembuat kebijakan dan tokoh masyarakat dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendorong inisiatif kehutanan masyarakat yang kolaboratif dan berkelanjutan (Setiawan & Muhammad, 2018).

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

Analisis aktor pada pengelolaan hutan rakyat di Desa Karacak Kabupaten

Bogor menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki peran dan pengaruh yang berbeda. Peran ini dibagi ke dalam empat jenis kategori berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu: 1) *keyplayers*; 2) *subject*; 3) *crowd*; dan 4) *context setter*. Aktor yang terlibat di dalamnya, antara lain masyarakat lokal, pemerintah desa, kelompok tani, dan LSM. Tantangan dalam pengelolaan hutan rakyat ini adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar aktor untuk mencapai sinergi yang efektif.

##### 4.2. Saran

Studi komparatif dengan desa lain yang memiliki kondisi serupa dapat memberikan wawasan tambahan mengenai praktik terbaik yang dapat diadopsi. Pemerintah daerah sebaiknya mengembangkan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh aktor dalam pengelolaan hutan rakyat. Kebijakan tersebut bisa mencakup insentif bagi petani yang berkomitmen pada praktik pengelolaan hutan rakyat lestari serta pemberian dukungan teknis dan finansial kepada kelompok tani.

##### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan bantuan dana pengabdian melalui Program Penguatan Kapasitas Ormawa tahun 2024.

##### Daftar Pustaka

- Darusman, D. & Hardjanto. (2006). Tinjauan ekonomi hutan rakyat. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan (FORDA). 2006 April 13. Bogor. Departemen Kehutanan, 4-13.
- Darusman, D., Hardjanto, Suharjito, D., Bahrani, Ichwandi, I., Hero, Y., Kartodihardjo, H., Sudaryanto, Nugroho, B., Nurrochmat, D.R., Sundawati, L., Purwawangsa, H., Trison, S., & Soedomo, S. (2013). *Membangkitkan Kehutanan Indonesia Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi*. Bogor (ID).

- IPB Press.
- [Dishut] Dinas Kehutanan. (2022). Luas Hutan Rakyat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Diakses dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/luas-hutan-rakyat-berdasarkankabupatenkota-di-jawa-barat>, pada 1 Juli 2024.
- Djamal, M., Hardjanto, & Hero, Y. (2018). Ukuran dasar kelestarian produksi pada hutan rakyat di Kabupaten Barru. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 9(2), 85-92.
- Fauzan, H., Sulistyawati, E., & Lastini, T. (2019). Strategi pengelolaan untuk pengembangan hutan rakyat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 164-173.
- Hardjanto. (2003). *Keragaman dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa* (Disertasi). Program Pendidikan Doktor Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hardjanto. (2017). *Pengelolaan Hutan Rakyat*. Bogor. IPB Press.
- Kimaro, P.J. (2023). Community participation in sustainable forest management: a case of nsieni forest in Hai District, Tanzania. *East African Journal of Education and Social Sciences*. 4(2), 159-174. doi: 10.46606/eajess2023v04i02.0289.
- Kurniawan, A. Hidayat, J.W., & Amirudin, A. (2020). Partisipasi masyarakat: mendukung keberhasilan pengelolaan hutan rakyat. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang 20 Oktober 2020, 93-102.
- Krott, M. (2005). *Forest Policy Analysis*. Netherland. Springer.
- Maimunah, S., Mudzakir, H., Sopan, M., & Samek, J.H. (2020). Kenaekaragaman jenis pohon penyusun arboretum konservasi hutan hujan tropis PT Asmin Bara Bronang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. *Jurnal Hutan Tropis*, 8(3), 274-280.
- Notoatmodjo, S. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H., & Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? a typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90, 1933-1949.
- Setiawan, M.A. & Muhammad, F. (2018). Stakeholder analysis in utilizing of environmental services and natural attractions in Tuk Semuncar utilization zone of Gunung Merbabu National Park: a literature review. *E3S Web of Conferences*, 31 (2018) 09032. doi: 10.1051/e3sconf/20183109032.
- Sylviani, Suka, A.P., Surati, & Kurniasari, D.R. (2020). Social capital in managing community plantation forest: a case study at KPH Boalemo, Gorontalo Province. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 7(1), 71-82. doi: 10.20886/ijfr.2020.7.1.711-82.
- Sukwika, T. (2018). Analisis aktor dalam perumusan model kelembagaan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(2), 133-150. doi: 10.29244/jp2wd.2018.2.2.133-150.
- Tabot, A., Owuor, O., & Migosi, J. (2020). Influence of participatory project initiation on sustainable forest management in Saboti, Trans-Nzoia Country, Kenya. *Internasional Journal of Forestry Research*, 1-7. doi: 101155/2020/2648391.
- Turner, D.P. (2020). Sampling methods in research design. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*, 8-12. <https://doi.org/10.1111/head.13707>.